

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus negara yang memiliki garis pantai terpanjang tentu memiliki potensi yang luar biasa. Perkembangan ekonomi Indonesia terus bergeliat seiring permintaan pasar yang besar hingga potensi pengembangan sumber daya alamnya yang kaya. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk membuat ekonomi Indonesia maju adalah Pariwisata. Sektor Pariwisata menempati peringkat kedua sebagai penyumbang devisa nasional terbesar setelah minyak sawit mentah dengan penghasilan 13,5 juta dollar AS per tahun pada 2016.¹ Suatu potensi yang oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya disebut sebagai peluang untuk menyumbangkan produk domestik bruto, devisa, dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah.²

Tahun 2019 Industri Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia yaitu US\$ 24 Miliar, melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Kelapa Sawit. Dampak devisa dari pariwisata yang masuk, dapat langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.³ Eksistensi pariwisata tersebut memiliki pengaruh secara langsung terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan sektor lainnya

¹Tahun 2016, devisa pariwisata telah mencapai 13,5 juta dollar AS per tahun. Sektor pariwisata hanya kalah dari minyak sawit mentah (CPO) yang sebesar 15,9 juta dollar AS per tahun. Padahal pada 2015 lalu, pariwisata masih ada di peringkat keempat sebagai sektor penyumbang devisa terbesar. Sebagaimana dikutip dari: Yoga Sukmana, "3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua", dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/3-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua> diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 09:53 WIB.

² Pernyataan ini disampaikan pada saat pemaparan capaian sektor Pariwisata 3 Tahun Jokowi-JK.

³ Lih. Kurnia Sari Aziza, "Pariwisata Diprediksi akan jadi Penyumbang Terbesar Devisa Indonesia", dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/052923826/pariwisata-diprediksi-akan-jadi-penyumbang-terbesar-devisa-indonesia> diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 09:54 WIB.

seperti politik, sosial, budaya, lingkungan, tingkat kesejahteraan, kemaritiman, hingga perdamaian.

Tabel 1.1 Perolehan Devisa Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016.

2014		2015		2016	
Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta US\$)
Migas	30,318	Migas	18,574	CPO	15,965
Batu Bara	18,697	CPO	16,427	Pariwisata*)	13,568
CPO	18,615	Batu Bara	14,717	Migas	13,105
Pariwisata	11,166	Pariwisata	12,225	Batu Bara	12,898
Pakaian jadi	7,450	Pakaian jadi	6,410	Pakaian jadi	6,229
Alat Listrik	7,021	Alat Listrik	4,510	Alat Listrik	4,561
Bahan Kimia	6,486	Karet olahan	3,564	Perhiasan	4,119
Karet Olahan	6,259	Kertas	3,546	Kertas	4,032
Kertas	5,379	perhiasan	3,319	Bahan kimia	3,700
Perhiasan	3,914	Bahan kimia	3,174	Karet olahan	3,242
Tekstil	3,853	Tekstil	1,927	Tekstil	1,848
Kayu Olahan	3,780	Kayu Olahan	1,352	Kayu olahan	1,279

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, pada *Multilateral Meeting 29 Februari 2016*.

Kebudayaan Bali telah terkenal oleh karena keunikannya yang berasal dari kekhasan akibat pertumbuhan dari daya cipta, rasa, dan karsa. Kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan dari keseniannya, dalam masyarakat yang berciri khas sosial religius.⁴ Daya tarik Bali bisa dikatakan sebagai anugrah terhadap eksistensi pariwisata Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini. Peranan budaya dalam masyarakat Bali sangat kuat mulai dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Kekuatan keagamaan dan budaya bersatu sangat kuat pada setiap sisi kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana diketahui, perkembangan pariwisata Indonesia tidak lepas dari tumbuh kembang pariwisata Bali.⁵ Masyarakat Bali hingga saat ini tetap menjaga ketahanan budaya agar supaya kesejahteraan ekonomi dapat tetap bertahan atau bahkan meningkat.

⁴ Ida Bagus Mantra, *Landasan Kebudayaan Bali*, (Denpasar: Yayasan Dharma Sastra, 1996), hlm. 2.

⁵ Fatmawaty Malik, "Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali", *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016, hlm. 68.

Oleh karena itu, pariwisata sangat menentukan tingkat kesejahteraan para pelaku wisata, terutama masyarakat Bali itu sendiri.

Pemerintah Indonesia selanjutnya harus memperhatikan pelbagai masalah yang terdapat di sektor pariwisata. Perkembangan Pariwisata Indonesia berdasarkan data laporan dari *World Economic Forum*⁶ yakni *Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Edition*⁷, memperoleh peringkat ke-42 dari 136 negara di dunia. Peringkat tersebut memang terlihat meningkat dibandingkan capaian pada Tahun 2015 yang mana Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara di dunia. Total nilai (*score*) pariwisata Indonesia juga meningkat dari 4.0 pada Tahun 2015 menjadi 4.2 pada Tahun 2017 (naik 0.2). *World Economic Forum* dalam merumuskan laporan ini berdasarkan pada 14 indikator dan 89 sub-indikator. Masing-masing indikator juga memuat peringkat dan nilai negara-negara di dunia.


Salah satu indikator yang “secara konsisten” memperoleh rapor merah dari Kementerian Pariwisata adalah *Safety and Security* (Keamanan dan Keselamatan). Data teraktual memperlihatkan bahwa sektor ini menempati peringkat 91 dari 136 negara pada tahun 2017. Sektor lain seperti, *Health and hygiene* (Kesehatan dan kebersihan: 108/136) dan *Environmental Sustainability* (Ketahanan Lingkungan: 131/136) juga memperoleh peringkat yang cukup buruk dalam perkembangan pembangunan pariwisata Indonesia. Selanjutnya, indikator keamanan dan keselamatan memiliki lima sub-indikator yang diantaranya,

⁶*World Economic Forum* (Forum Ekonomi Dunia) merupakan lembaga/ organisasi internasional independen yang didirikan di Jenewa, Swiss pada tahun 1971. Forum ini digunakan sebagai titik pertemuan para praktisi dunia, mulai dari pemerintah, cendekiawan, hingga pelaku bisnis dunia. Pelbagai sektor yang terkait dengan ekonomi dunia dibahas dalam forum ini, seperti pendidikan, gender, lingkungan, makanan, energi, kesehatan, hingga produksi.

⁷ Indeks Daya Saing Pariwisata dan Perjalanan ini pertama kali dilaksanakan WEF pada Tahun 2007 yang selanjutnya dilaksanakan secara berkelanjutan setiap dua tahun sekali.

- 1) Kerugian akibat tindak kriminal dan kekerasan (*business costs of crime and violence*).
- 2) Reliabilitas pelayanan pihak kepolisian (*reliability of police services*).
- 3) Kerugian akibat aksi terorisme (*business costs of terrorism*).
- 4) Indeks insiden terorisme (*index of terrorism incidence*)
- 5) Tingkat pembunuhan (*homicide rate*).

Tabel 1.2 Data Peringkat Sub-Indikator Keamanan dan Keselamatan Pariwisata Indonesia Tahun 2017

 Safety and security	81	5.1
Business costs of crime and violence	100	3.8
Reliability of police services	79	4.3
Business costs of terrorism	113	4.2
Index of terrorism incidence	107	5.3
Homicide rate /100,000 pop.	6	0.5

Sumber: Travel & Tourism Competitiveness Index 2017.

Kelima indikator ini secara langsung terkait dengan isu keamanan nasional karena menyangkut keterjaminan atas keberadaan objek vital yang salah satunya kawasan pariwisata strategis hingga keselamatan warga negara maupun wisatawan. Tindak lanjut mengenai kondisi keamanan dan keselamatan pariwisata di Bali masih tetap terjaga, disamping realita eskalasi dan de-eskalasi konflik yang seakan membentuk suatu fenomena gunung es.⁸

Para leluhur Bali sejatinya telah memberikan konsep yang secara komprehensif dapat menjamin keamanan dan keselamatan seluruh

⁸ Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik kepentingan pariwisata (persaingan pariwisata antar negara) masih berlangsung sehingga menimbulkan suatu keterancamannya bagi eksistensi pariwisata Bali khususnya, dan Pariwisata Indonesia pada umumnya. Maka dari itu ancaman terhadap keamanan dan keselamatan pariwisata Bali akan selalu ada dan hal ini akan membentuk suatu situasi *negative peace*. Maka dari itu, dibutuhkan suatu aksi nyata dalam menjaga keamanan dan keselamatan pariwisata Bali, setidaknya dari bahaya ancaman lima indikator yang telah ditentukan oleh *World Economic Forum*.

komponen kehidupan, termasuk pariwisata. Konsep tersebut berupa kearifan lokal yakni *Tri Hita Karana*.⁹ Filsafat *Ahimsa* dalam Hindu yang berarti tidak menyakiti/ membunuh semua makhluk, menjadi peletak dasar filosofis dari konsep *Tri Hita Karana*. Oleh karena suatu pandangan yang bebas dari sifat menyakiti dan atau membunuh makhluk lain, sebelum itu telah eksis juga ajaran *Tri Kaya Parisudha*¹⁰ yang berfungsi sebagai kontrol individu yakni berperilaku, berkata, dan berpikir yang baik. Atas dasar kedua konsep tersebut, maka *Tri Hita Karana*¹¹ merupakan sebuah ajaran bagi masyarakat Bali untuk menjaga hubungan harmonis dengan tiga unsur utama kehidupan, yakni manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam/lingkungan. Oleh karena kerangka *local genius* tersebut, maka seharusnya keamanan dan keselamatan pariwisata di Bali dapat terjamin. Akan tetapi memang, eksistensi ancaman memang bersifat mengiringi kehidupan manusia di seluruh dunia, oleh karena itu aspek keamanan harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai perdamaian.

Indikator Keamanan dan Keselamatan Pariwisata dalam hal ini tentu terkait langsung dengan lingkungan strategis kepentingan negara yang kemudian mendasari konsep keamanan nasional. Keamanan nasional mempertanyakan tentang sesuatu yang perlu dipertahankan, sehingga ia berkenaan dengan dua pertanyaan *dasar what is that we seek to defend?*

⁹ Istilah Tri Hita Karana pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharmanya untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah Tri Hita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Lih. Anonim, "Tri Hita Karana dalam Agama Hindu", dalam <http://www.babadbali.com/canangsari/trihitakarana.htm> diakses pada 15 Agustus 2018, Pukul 10:44 WIB.

¹⁰ Tri Kaya Parisudha terdiri dari tiga bagian yakni; (1) Kayika Parisudha yang berarti berperilaku yang baik dan benar; (2) Wacika Parisudha yang berarti bertutur kata yang baik dan benar; dan (3) Manacika Parisudha yang berarti berpikir yang baik dan benar.

¹¹ Tri Hita Karana terdiri dari tiga bagian yakni; (1) Parhyangan yang artinya hubungan harmonis setiap manusia dengan Tuhan; (2) Pawongan yang artinya hubungan harmonis antar sesama manusia; (3) Palemahan yang artinya hubungan harmonis manusia dengan alam/ lingkungan sekitar.

dan *why do we wish to defend it?*. Hal ini sehubungan tentang kebijakan "kepentingan nasional." Karenanya, sebelum merumuskan tentang kebijakan keamanan nasional, maka pertama-tama perlu dipahami isu ini berkenaan dengan kepentingan nasional.¹²

Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, diantaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat.¹³ Francis Fukuyama yang seorang Hegelian, membuktikan kebenarannya di tahun-tahun pertama abad 21. Peristiwa 911 yang berupa penyerangan di gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon di Washington DC dapat membagi antara fase pertama dan kedua dari pasca sejarah. Pada masa sejarah yang baru (saat ini), negara tidak lagi berperang melawan negara lain, namun lebih kepada berperang terhadap fenomena sel-sel terorisme *amorf* (yang tidak berbentuk). Pada zaman ini, eksistensi perang berada pada ranah pertempuran yang baru – pusat kehidupan rekreasi warga sipil.¹⁴

Pariwisata pada kajian ini termasuk dalam ranah keamanan non-tradisional. Era globalisasi pemikiran keamanan memiliki makna yang luas dan sifatnya non-militer, dalam arti pemikiran yang dikaitkan dengan konsep keamanan terhadap individu, yang dikenal dengan konsep *human security*. Konsep ini didasarkan pada dua komponen kebebasan negatif, yakni bebas rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*), yang merupakan bagian dari hak yang diakui oleh PBB sejak awal berdirinya lembaga internasional tersebut.¹⁵

¹² Riant Nugroho, *National Security Policy (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 22.

¹³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2015), hlm. 27.

¹⁴ Yoel Mansfeld & Abraham Pizam (editor), *Tourism Security & Safety*, (USA: Elversier Butterworth, 2006), hlm. 34.

¹⁵ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: CAPS [Center of Academic Publishing Service], 2014), hlm. 9.



Sumber: TTCI 2007-2017 (diolah secara mandiri oleh peneliti).

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Peringkat Sektor Keamanan dan Keselamatan Pariwisata Indonesia Tahun 2007-2017

Data diatas memperlihatkan bahwa sektor Keamanan dan Keselamatan dalam pariwisata patut mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia. Pada hakikatnya semua manusia memiliki keinginan untuk hidup aman dan nyaman (*safety*). Hal ini berlaku juga pada lingkungan pariwisata yang mana para wisatawan tentu ingin keselamatan dan keamanannya terjamin saat melaksanakan liburan atau perjalanan wisata. Identitas manusia yang sudah tentu berbeda kerap kali membuahkan hasil konflik yang berujung hancurnya sektor keamanan dan keselamatan ini. Fenomena terorisme dapat menjadi contoh dalam hal ini. Identitas subjek individu yang kemudian mendapat predikat teroris didasarkan pada pembelaan terhadap identitas dirinya yang kemudian berusaha memusnahkan identitas kaum lain yang berbeda dengan cara kekerasan, bom misalnya.

Fenomena Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005) menjadi catatan khusus dalam sektor keamanan dan keselamatan dalam pariwisata. Hal

ini disebabkan karena para wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata secara keseluruhan dalam kondisi bahagia sekaligus ingin memperluas wawasannya. Hasil yang sangat kontradiktif akan ditemukan saat terjadi bencana dan serangan teror bom pada sektor strategis pariwisata Indonesia yakni Bali yang kemudian melumpuhkan perekonomian dan menjadi pemicu konflik sosial akibat dari kejadian tersebut. Konflik terjadi akibat sebuah situasi ketidaksepahaman yang melibatkan pihak-pihak karena merasa terancam dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perhelatan ideologi dan kebenaran subjektif menjadi alasan aktor konflik dalam sektor terorisme untuk melakukan kekerasan. Dampak dari Bom Bali 1 dan 2 yaitu antara lain adalah; Bali dianggap tidak aman untuk wisatawan, tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis, sektor pariwisata kolep/gulung tikar, ekonomi goyah, karyawan dirumahkan (PHK) dan kriminalitas meningkat. Terjadinya bom Bali 1 tanggal 12 Oktober tahun 2002, menimbulkan pertanyaan 2 perwakilan asing tentang hotel yang aman untuk ditempati di wilayah Bali. Sehingga diputuskan untuk melaksanakan Verifikasi Standar Keamanan dan Keselamatan Hotel (SKKH) tahun 2004-2011 dan pada tahun 2013 dilaksanakan Verifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Hotel oleh Ditpamobvit Polda Bali.¹⁶ Dampak lain dari kejadian ini adalah eskalasi konflik mulai dari sektor rumah tangga, ekonomi masyarakat, hingga pada rasa trauma yang mendalam. Fenomena yang terlihat hanya eksistensi Bom Bali itu sendiri, seperti jumlah korban, kerusakan, kerugian, dan identifikasi pelaku. Namun disamping itu, terdapat ribuan pekerja pariwisata kehilangan pekerjaannya yang memicu perasaan frustrasi dan pada akhirnya berdampak pada perilaku yang bersifat destruksi (tindakan agresi).

¹⁶ I Made Dedy Priyanto dkk, *Efektivitas Peran Polisi Pariwisata dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Pariwisata pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Bali* (Laporan Penelitian Dosen Muda), (Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2015), hlm. 29.

Tantangan yang muncul dalam kajian keamanan nasional (*national security*) yang tidak lagi bersifat konvensional yakni melalui perang-perang simetris antar aktor Negara, namun berkembang menjadi perang-perang asimetris antara aktor Negara dengan non-negara, khususnya antara Negara dengan "teroris".¹⁷ Permasalahan ini menjadi masalah lembaga pariwisata dan seluruh negara, karena jaminan keselamatan dapat meningkatkan kemungkinan kunjungan ke suatu destinasi wisata tertentu. Selanjutnya, target wisatawan dan fasilitas wisata secara sengaja dilakukan oleh teroris karena secara jelas gangguan arus wisatawan dapat berdampak langsung dengan situasi sosial politik dan internasional dimana sektor pariwisata memiliki kontribusi GNP yang signifikan¹⁸

Keselamatan dan keamanan selalu menjadi syarat mutlak untuk perjalanan pariwisata yang selanjutnya harus segera mendapatkan resolusi dari *stakeholder* di bidang pariwisata Indonesia. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa isu keselamatan dan keamanan memperoleh perhatian yang jauh lebih besar dalam dua dekade terakhir di bidang pariwisata. Perubahan yang terjadi selama dua dekade terakhir sangat besar, karena tindakan terorisme, perang lokal, bencana alam, epidemi dan pandemi, keamanan telah menurun secara signifikan.¹⁹ Penanganan aksi terorisme di Indonesia memang telah mendapat perhatian khusus pemerintah dengan terbentuknya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror hingga berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

¹⁷ Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁸ Ninela Kordić, dkk, *Safety and Security as Factors of Tourism Destination Competitiveness*, (Serbia: Singidunum University, Belgrade, 2015), hlm. 35.

¹⁹ István Kôvári & Krisztina Zimányi, *Safety and Security Age of Global Tourism (The changing role and conception of Safety and Security in Tourism)*, (Budapest: Agroinform Publishing House, 2011), hlm. 59.



Sumber: TTCI 2007-2017 (diolah secara mandiri oleh peneliti).

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Peringkat Keseluruhan Pariwisata Indonesia Tahun 2007-2017

Data diatas memperlihatkan bahwa, Pariwisata Indonesia menempati posisi terbaik pada Tahun 2017. Sejak WEF menerbitkan laporan daya saing pariwisata negara-negara di dunia, Indonesia sebenarnya sudah secara konsisten berusaha membenahi sektor yang belum mendapatkan skor baik. Hal ini dilakukan karena tahun 2019 pemerintah memiliki target menjadikan pariwisata sebagai sektor penyumbang devisa terbesar nasional. Fenomena saat ini, untuk terus membuat peringkat Pariwisata Indonesia semakin baik maka pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dapat berfokus pada beberapa peringkat yang dinilai kurang sehingga tujuan bisa tercapai. Lebih lanjut, dalam kerangka Kebijakan Keamanan Nasional posisi pariwisata Indonesia berada pada “ring 2” yakni pada sektor kebijakan perlindungan rakyat Indonesia, disamping kebijakan ketahanan keuangan nasional, kebijakan perlindungan pelaku ekonomi nasional, dan kebijakan pembangunan

nasional.²⁰ Kerangka tersebut kemudian memposisikan pariwisata Indonesia sebagai salah satu kepentingan perekonomian nasional sebagai prioritas daripada kebijakan keamanan nasional. Keamanan sumber daya pariwisata sebagai bagian dari perlindungan pelaku ekonomi nasional hingga sebagai sektor penyumbang devisa terbesar ketiga menjadi alasan yang cukup kuat dalam penyusunan kebijakan keamanan dan keselamatan di bidang pariwisata.

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya meningkatkan peringkat Pariwisata Indonesia. Maka dari itu, manusia sebagai subjek pariwisata punya sifat yang berbeda satu sama lain, sehingga butuh pemahaman mendasar bagi eksistensi manusia dalam pariwisata. Manusia pada dasarnya merupakan *viator mundi* yang artinya seorang pengelana dunia, terangnya alasan mengapa manusia selalu butuh melakukan perjalanan.²¹ Hamersma kemudian memperkuat argumen ini, yang menyebut bahwa manusia berani berpikir secara baru, antara lain mengenai dirinya sendiri, manusia menganggap dirinya sendiri tidak lagi sebagai *viator mundi*, yaitu orang yang berziarah di dunia ini, melainkan sebagai *faber mundi*, yakni orang yang menciptakan dunianya. Manusia sendiri dianggap sebagai pusat kenyataan.²² Erich Fromm sebagai seorang psikoanalisis yang humanis memberikan pemahaman baru terkait eksistensi manusia. Pemikiran Erich Fromm berpijak pada kehendak manusia dalam mempertahankan eksistensinya dan salah satu jalannya adalah berperang. Jadi kekerasan

²⁰ Pada "ring 1" yakni kebijakan pertahanan, luar negeri, politik nasional, ketertiban nasional, hingga kebijakan keamanan informasi dan komunikasi memang memiliki ranah yang lebih luas daripada sekadar urusan pariwisata. Namun, lebih jelas lagi sektor keamanan dan keselamatan pariwisata dalam hal ini memiliki sub-sektor tentang terorisme yang merupakan ancaman nyata. Oleh karena itu, bisa saja pariwisata juga termasuk pada "ring 1" dalam Kerangka Kebijakan Keamanan Nasional. Lih. Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm. 26-27.

²¹ Tim Wesfix, *Traveler's Wisdom*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2013), hlm. x

²² I Made Raditya Suputra Sanjaya, *Makna Perjalanan pada Buku Titik Nol Karya Agustinus Wibowo dalam Perspektif Filsafat Kehendak Paul Ricoeur*, (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 2.

sudah ada sejak manusia ada. Keamanan dan keselamatan bergantung penuh pada kehendak manusia dalam kehidupan. Pasca perang dunia I dan II yang bercirikan peran manusia sudah tergantikan oleh alat-alat (mesin) teknologi sehingga manusia mengalami alienasi terutama dalam pencarian identitas. Fenomena kekerasan terorisme yang mengancam keamanan hampir di seluruh negara di dunia sangat erat kaitannya dengan keterasingan identitas individu yang oleh analisa Fromm dianggap sebagai masyarakat yang sakit (tidak sehat).²³ Erich Fromm pada dasarnya memiliki keinginan untuk mengajak manusia kembali menjadi manusia, yakni manusia yang humanis.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Peringkat 91 yang diberikan oleh *World Economic Forum* pada Indeks Daya Saing Pariwisata di dunia pada sektor keamanan dan keselamatan (*safety and security*) untuk Pariwisata Indonesia menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Sub-indikator dari sektor keamanan dan keselamatan (*safety and security*) pariwisata yakni,

1. kerugian akibat tindak kriminal dan kekerasan (*business costs of crime and violence*),
2. reliabilitas pelayanan pihak kepolisian (*reliability of police services*),
3. kerugian akibat aksi terorisme (*business costs of terrorism*);
4. indeks insiden terorisme (*index of terrorism incidence*),

kemudian membuat penelitian ini lebih terfokus dan menjadi sub-fokus penelitian. Alasan peneliti tidak memuat satu sub-indikator (Tingkat pembunuhan/ *homicide rate* dalam fokus penelitian adalah karena indeksinya sudah baik atau menempati peringkat ke 6 dari 136 negara dengan perolehan score 0,5. Indeks ini berarti tingkat pembunuhan di

²³ Pendalaman ini berdasarkan karya-karya Erich Fromm terkait eksistensi manusia berdasarkan beberapa buku yang ditulis seperti *The Sane Society* (Masyarakat yang Sehat), *Man for Himself* (Manusia bagi Dirinya), *The Revolution of Hope* (Revolusi Harapan), dan *To have or to be* (Memiliki dan Menjadi – Tentang Dua Modus Eksistensi).

sektor pariwisata relatif sangat kecil terjadi selama periode dua tahun (2015-2017).

Sementara teori *National Security* (Keamanan Nasional), Keamanan Manusia (*human security*), teori keselamatan pariwisata, dan pendekatan filsafat manusia Erich Fromm digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Fokus peneliti dalam menentukan pembatasan masalah penelitian yakni pada sektor dan sub-sektor keamanan dan keselamatan (*safety and security*). Kemudian batasan lokasi penelitian yakni wilayah Bali sebagai representasi pariwisata Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Deskripsi latar belakang di atas kemudian mengantarkan peneliti dalam menyusun dua rumusan masalah yakni,

- 1.3.1 Bagaimana kondisi sektor keamanan dan keselamatan Pariwisata Bali sebagai representasi pariwisata Indonesia?
- 1.3.2 Bagaimana upaya peningkatan sektor keamanan dan keselamatan dalam mewujudkan perdamaian pariwisata Bali?

1.4 Tujuan Penelitian

Deskripsi latar belakang masalah hingga rumusan masalah telah terjabarkan sehingga penelitian ini butuh sebuah tujuan. Tujuan penelitian dterbagi menjadi dua bagian yakni, pertama mengenai kondisi atau realita lapangan tentang keamanan dan keselamatan pariwisata Bali. Kedua adalah tentang upaya peningkatan sektor keamanan dan keselamatan pariwisata di Bali dalam mewujudkan pariwisata damai. Selengkapnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1.4.1 Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai realita pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Bali yang berfokus pada sektor keamanan dan keselamatan. Peneliti tetap berpijak pada empat sub-sektor dari sektor keamanan dan

keselamatan pariwisata yakni, (1) kerugian akibat tindak kriminal dan kekerasan (*business costs of crime and violence*); (2) reliabilitas pelayanan pihak kepolisian (*reliability of police services*); (3) Kerugian akibat aksi terorisme (*business costs of terrorism*); dan (4) indeks insiden terorisme (*indeks of terrorism incidence*).

1.4.2 Tujuan penelitian yang kedua adalah melakukan analisis guna meningkatkan peringkat dari keempat sub-sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali. Kondisi yang ada saat ini akan dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan konsep keamanan yakni konsep keamanan nasional, keamanan pariwisata, dan keamanan manusia. Disamping tujuan spesifik tentang upaya untuk meningkatkan peringkat nilai pariwisata Indonesia dalam *Travel & Tourism Competitiveness Index*, penelitian ini juga bertujuan untuk menciptakan suatu gagasan pariwisata damai (*peace tourism*) di Bali yang selanjutnya dapat diaplikasikan pada daerah lain yang memiliki potensi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini dapat juga berfungsi sebagai kerangka analisis dalam menyikapi potensi ancaman terorisme di objek-objek vital pariwisata di Bali, sehingga akan tercipta suatu kondisi aman. Penelitian ini juga ingin mencoba menawarkan sebuah konsep dalam memahami eksistensi manusia sebagai subjek dan objek pariwisata. Erich Fromm memiliki pandangan psikologis tersendiri terhadap kehendak dan atau agresi manusia dalam mempertahankan diri hingga melakukan kekerasan. Manusia sebagaimana diketahui merupakan subjek sekaligus objek konflik, maka dari itu sektor keamanan dan keselamatan hingga kegiatan terorisme merupakan kehendak subjek itu sendiri. Erich Fromm dalam hal ini mencoba menawarkan sebuah konsep pengenalan identitas manusia yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kendati demikian Fromm pun dalam hal ini membuat terobosan baru dengan tidak memihak pada psikoanalisis Sigmund Freud maupun konsep sosialis Karl Marx, namun

lebih daripada itu, identitas manusia dalam membangun dirinya dan dunianya akan memengaruhi kualitas hidup individu.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Unsur kebermanfaatannya penelitian ini dari sisi ilmiah akademis adalah upaya penerapan teori dan segala mata kuliah yang pernah dipelajari selama menjalani pendidikan strata dua pada program studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan. Kajian Pariwisata Damai sebagai suatu kondisi yang bermakna *positive peace* juga diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Penerapan mata kuliah *National Security Policy* pun memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya karya ilmiah di bidang damai dan resolusi konflik utamanya dalam bidang Kebijakan Keamanan Nasional pada sektor pariwisata.

Kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pertahanan di Indonesia diharapkan menjadi manfaat selanjutnya pada penelitian ini. Ilmu pertahanan kedepannya akan banyak mengambil peran di tengah kehidupan dunia yang milenial ini dan dalam upaya menghadapi ancaman non-negara. Sebagaimana eksistensi terorisme yang menjadi musuh bersama negara-negara yang secara langsung maupun tidak langsung membuat perasaan rasa tidak aman individu masyarakat. Ilmu pertahanan yang pada hakikatnya berakar dari ilmu perang yang ditarik lagi menjadi seni perang merupakan sesuatu yang tidak pernah hilang. Pada saat ini masyarakat dunia tengah berperang melawan kemiskinan, terorisme, narkoba, hingga perdagangan manusia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Unsur kebermanfaatan secara praktis selanjutnya adalah penelitian ini dapat memberi rekomendasi secara langsung terhadap pengampu kebijakan yakni pemerintah Indonesia terutama Kementerian Pariwisata. Keterjaminan atas keselamatan dan keamanan pariwisata sudah sepatutnya mendapat prioritas mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang secara jelas menimbulkan efek tidak aman dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Sektor ini juga tidak hanya berpengaruh terhadap situasi damai manusia, namun juga keamanan wilayah (nasional).

Peningkatan sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan juga menjadi tujuan penelitian secara praktis. Masyarakat Bali dapat membangun kesadaran dalam melaksanakan pelbagai upaya peningkatan keamanan dan keselamatan pariwisata. Hal ini berimplikasi pada pelbagai perubahan dinamis yang ada, sehingga butuh kesiapsiagaan dan rasa peduli dalam menghadapinya.